



Pansus Pemilu tidak Diperlukan

FRAKSI Partai Golkar menegaskan menolak usulan pembentukan panitia khusus (pansus) Pemilu 2019. Hal itu merespons usulan Fraksi PKS dan Gerindra yang mendasarkan pembentukan pansus pada dugaan kecurangan di pemilu dan gugurnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Penolakan Golkar terhadap pembentukan pansus pemilu sejalan dengan sikap Fraksi NasDem, PDIP, dan PPP yang sudah terlebih dahulu menyatakan menolak. Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR, Adies Kadir, mengatakan Golkar memandang tidak perlu ada pansus pemilu karena pemilu telah dilaksanakan dengan baik. "Kami sampaikan Fraksi Partai Golkar menolak dengan tegas usul dibentuknya Pansus Pemilu," ujar Adies, dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Adies mengatakan, bila ada pihak yang menilai masih adanya kecurangan atas hasil Pemilu 2019, mereka bisa mengajukan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah tersebut sesuai dengan regulasi yang ditetapkan konstitusi. "Jadi silakan saja menga-

"Jadi silakan saja mengajukan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK)."

Adies Kadir
Sekretaris Fraksi Partai Golkar

ajukan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkap Adies.

Adies mengatakan memang masih adanya kecurangan di Pemilu 2019. Namun, hal itu masih bisa diatasi KPU dan juga Bawaslu.

Ia pun menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya petugas KPPS, termasuk Petwaslu di berbagai tingkatan.

"Ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas wafatnya orang di jajaran KPU dan Bawaslu di berbagai tingkatan di seluruh Indonesia sebagai pahlawan demokrasi," ungkap Adies.

Di kesempatan terpisah, tokoh nasional yang mendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Rizal

Ramli, menantang data kemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01.

"Saya akan membawa ahli IT dan ahli statistik untuk menantang debat secara terbuka dengan KPU dan pihak yang mengaku memiliki data kemenangan paslon nomor urut 01 untuk berdebat secara terbuka, dan disiarkan media televisi," tegas Rizal Ramli, di Jakarta, kemarin.

Menurut Rizal, tantangan debat publik terkait dengan penghitungan suara Pilpres 2019 adalah bagian dari pembelajaran demokrasi serta menyelamatkan kedaulatan rakyat. Tantangan debat itu juga semata-mata untuk menjalankan prinsip demokrasi, yakni, bebas, adil, dan jujur.

"Kalau merasa punya komitmen menjaga demokrasi dan ingin menegakkan kedaulatan rakyat, harusnya mereka mau menerima tantangan saya," kata mantan Menko Kamaritman ini.

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar BPN Laode Kamaluddin mengungkapkan, berdasarkan data sistem informasi Direktorat Satgas BPN, perolehan suara Prabowo-Sandi unggul. Hingga Selasa (14/5), pasangan Prabowo-Sandiaga diklaim memperoleh suara 54,24%, sedangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin memperoleh suara 44,14% suara. (Pro/Ant/P-2)

MEDIA CENTER / Tim Kampanye Nasional JOKO WIDODO KH. MA'RUF AMIN



"SAYA INGIN MEMELUK SAUDARA-SAUDARA SEMUANYA DALAM SEBUAH PELUKAN SATU INDONESIA"



MI/ADAM DWI

REKONSILIASI PASCAPEMILU: Para pembicara (dari kiri) Direktur Program TKN Jokowi-Amin, Aria Bima, tokoh nasionalis Eros Djarot, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto, dan Sosiolog Universitas Indonesia Prof Thamrin Amal Tamagola berbicara dalam diskusi di Media Center TKN, Jakarta, kemarin. Diskusi membahas tema *Rekonsiliasi pascapemilu*.

Sepuluh Pemimpin Muda Serukan Perdamaian

Pertemuan tokoh muda politik dan kepala daerah di Bogor tersebut merespons kekhawatiran atas perkembangan situasi di Tanah Air saat ini.

DEDE SUSIANTI
anti@mediaindonesia.com

SEPULUH tokoh pemimpin muda menggelar rapat tertutup di Museum Kepresidenan Balai Kirti, Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Mereka merumuskan strategi perdamaian jelang pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada 22 Mei mendatang.

Hadir dalam rapat itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkiefflimansyah, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Banyuwangi Azwar Anas, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid, Ketua Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto selaku tuan rumah.

Sedinya acara tersebut dihadiri juga Gubernur DKI Anies Baswedan. Namun, menurut Bima Arya, Anies Baswedan batal hadir karena menghadiri syukuran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang baru saja menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

"Mas Anies sempat oke. Pertama Mas Anies sangat responsif, tadi pagi juga oke. Tapi mendadak tadi menjelang sore dikabari ternyata ada syukuran," ujar Bima Arya yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN).

Mereka yang hadir kompak menggunakan setelan putih-hitam, terkecuali Ganjar Pranowo yang mengenakan lurik lengkap dengan blankon.

Mereka datang bersamaan dari Kantor Wali Kota Bogor di Jalan Juanda atau jaraknya hanya sekitar 300 meter. Mereka menaiki Uncal, bus wisata khas Kota Bogor. Suasana ruangan rapatnya santai, tapi sedikit formal dengan meja dan kursi setengah lingkaran.

Acara rapat bertajuk Silaturahmi Bogor untuk Indonesia tersebut digagas Bima Arya. Menurut Bima, ia bersama sembilan tokoh muda yang hadir memiliki kepentingan yang sama, yakni menginginkan Ramadan lebih mengepulkan suasana yang sejuk di tengah hiruk pikuk pemilu.

Bima berharap pertemuan ini bisa menginspirasi masyarakat Indonesia untuk membangun kebersamaan. "Kita ingin Indonesia yang damai, seluruh pembicaraan tadi energi positif dan optimistik membangun Indonesia dengan cara yang damai," kata Bima.

Bima pun menjawab diplomatis ketika ditanya apakah kegiatan tersebut sudah ada sebelum pemilu, atau baru digelar sesudah pemilu.

"Sebetulnya kami sering bertemu dalam berbagai hal. Kami sering bertemu, ya cuma sekarang ini pas bulan Ramadan aja, Ramadan ini, saya kira penting untuk mencontohkan bahwa kita juga cinta silaturahmi dan kita menempatkan persahabatan di atas segalanya. Kemanusiaan di atas politik," pungkasnya.

Tunggu hasil

Agus Harimurti Yudhoyono atau yang kerap disebut AHY menyampaikan pertemuan itu merespons kekhawatiran atas perkembangan situasi di Tanah Air saat ini.

"Ternyata sampai hari ini perselisihan karena beda pilihan masih berlanjut. Pertanyaannya, sampai kapan? Mudah-mudahan kebersamaan kami menginspirasi generasi muda khususnya yang juga aktif dalam proses politik," kata AHY seusai rapat.

Menurut AHY, Ramadan ini harus digunakan masyarakat Indonesia sebagai momentum meredakan ketegangan pascapemilihan sembari menunggu hasilnya pada 22 Mei 2019.

"Jangan sampai perbedaan identitas di antara kita membuat negara kita semakin terpecah, justru perbedaan itu kekuatan bangsa ini. Semoga kita semua semakin dewasa dan bijaksana. Kita tunggu hasil," tandas AHY. (Ant/P-2)

Kemenkes Gelar Autopsi Kematian KPPS

KEMENTERIAN Kesehatan melakukan pengembangan investigasi penyebab kematian pada petugas Pemilu 2019 berupa audit medik dan autopsi verbal. Langkah tersebut dilakukan dengan menggandeng lembaga independen.

Audit medik digelar untuk petugas yang meninggal di rumah sakit. Adapun untuk petugas pemilu yang meninggal di luar rumah sakit dilakukan autopsi verbal oleh Asosiasi Institut Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) yang dipimpin Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

"Autopsi verbal bukan autopsi forensik. Ini dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian dengan wawancara kepada keluarga atau orang terdekatnya," ujar Menteri Kesehatan Nila F Moeloek melalui siaran pers, kemarin.

Autopsi verbal, ibunya, ketepatannya mencapai 80%. Ia menjelaskan penelitian bersama tim independen dilakukan dengan metodologi ilmiah *cave control*. Artinya, kasus yang meninggal dibandingkan dengan hal

yang sama dari sisi beban, umur, dan sebagainya.

Dari sana, dapat diketahui penyebab kematian, apakah ada penyakit atau tidak adanya penyakit. Penelitian juga bisa untuk melihat faktor risiko pekerjaan akibat beban kerja karena lamanya waktu bekerja atau karena lingkungan.

"Autopsi based on evidence untuk petugas pemilu ini," tutup Menkes. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan pun telah mengirim surat edaran kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi untuk melakukan pemeriksaan kepada petugas-petugas KPPS yang sakit.

"Upaya dalam pencatatan dan pendataan terus-menerus kami lakukan untuk mengetahui penyebab kematian ataupun kesakitan yang terjadi pada petugas KPPS dalam penyelenggaraan pemilu ini," jelasnya.

Data dari KPU menunjukkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal yaitu se-

banyak 485 orang dan yang sakit 10.997 orang. Seluruh Dinas Kesehatan telah melaksanakan audit medik kematian yang terjadi di rumah sakit.

Dari hasil audit tersebut telah terkumpul data sebanyak 39% dan data kesakitan terkumpul dari 24 provinsi. Data tersebut menyatakan bahwa data kesakitan terbanyak berada di Provinsi Banten dan DKI Jakarta, sedangkan data kematian tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Kemudian pada data kematian, terbesar dari kelompok usia lanjut, yaitu sebanyak 58% berusia di atas 50 tahun, bahkan sampai usia 70 tahun. Data penyebab kematian terbesar 51% disebabkan penyakit kardiovaskular atau jantung, termasuk juga stroke.

Penyebab kematian lainnya meliputi hipertensi, gagal pernapasan, asma, gagal ginjal, diabetes melitus, dan lever. Kemudian sebanyak 9% kematian petugas disebabkan oleh kecelakaan. (Ind/P-2)

PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDO KORDSA TBK

Pada hari Selasa, 14 Mei 2019, pukul 10.20 s/d 11.26 WIB, bertempat di Hotel Mulia, Narcissus Room, Mezzanine Level, Jalan Asia Afrika, Senayan - Jakarta 10270, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) PT INDO KORDSA Tbk, berkedudukan di Citeureup, Kabupaten Bogor (untuk selanjutnya disebut "Perseroan").

Pemberitahuan RUPS Tahunan telah dimuat dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2019 dan Panggilan RUPS Tahunan telah dimuat dalam Surat Kabar Harian Media Indonesia pada hari Senin, tanggal 22 April 2019.

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Emiten PT EDI Indonesia pada tanggal 18 April 2019 pukul 16.00 WIB, dalam RUPS Tahunan hadir pemegang saham dan kuasa-wakil pemegang saham Perseroan 446.635.853 (empat ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga saham atau 99,25% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh lima persen) dari jumlah saham 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta) yang dikeluarkan oleh Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Ringkasan Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS Tahunan, dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. RUPS Tahunan berdasarkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2018:
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2018 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018; dan
 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba dan Rugi Perseroan serta penjelasan atas dokumen tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja & Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material" sesuai dengan laporannya tertanggal 22 Maret 2019 No. 001252.1005/AU.1040847-11/III/2019
 - Pengumuman dalam surat kabar harian "Media Indonesia" tanggal 27 Maret 2019 atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, disahkan oleh Rapat ini, tanpa perubahan; dinyatakan berlaku pula sebagai pengumuman yang disyarkan dalam Pasal 66 ayat 4 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Direksi dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun buku 2018 tersebut, maka Rapat juga memberikan penulisan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan keepenggunaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.
- II. RUPS Tahunan berdasarkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebagai berikut:
 - a. Sejumlah Rp. 500.000.000,- untuk dana cadangan wajib sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 UUPU;
 - b. Bahwa sejumlah Rp. 225.000.000.000,- atau Rp. 500,-/saham dibagikan sebagai deviden yang berasal dari akumulasi laba ditahan Perseroan dari tahun-tahun buku sebelumnya, dimana pembagian deviden interim sebesar Rp.200,-/saham telah dibayarkan pada tanggal 29 November 2018 berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 12 November 2018. Bahwa sisa deviden yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp.300,-/saham, sehingga total deviden yang akan diterima oleh 1 (satu) saham adalah sebesar Rp.500,-.Memberikan kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan keputusan terkait Agenda kedua berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
- III. RUPS Tahunan berdasarkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat menyetujui:
 1. Menyetujui pengunduran diri Tuan ONG LIONG TIK sebagai Direktur Perseroan sejak ditugaskan Rapat ini;
 2. Menyetujui pengangkatan Tuan OMUR MENTES sebagai Direktur Perseroan berdasarkan keputusan Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi pada tanggal 13 Mei 2019 untuk masa jabatan terhitung sejak ditugaskan Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.
 - Sehingga dengan demikian susunan selengkapnnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditugaskan Rapat ini sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:
Presiden Komisaris : Tuan ALI CALISKAN
Komisaris : Tuan MEHMET MESUT ADA
Komisaris : Tuan IBRAHIM OZGUR YILDIRIM
Komisaris/Komisaris Independen : Tuan ADIL ILTER TURAN
Komisaris/Komisaris Independen : Tuan ANDREAS LESMANA

DIREKSI:
Presiden Direktur : Tuan MEHMET ZEKI KANAADIKIRIK
Direktur : Tuan CUNEYT TEKUL
Direktur : Tuan OMUR MENTES
Direktur : Tuan RADEN WAHYU YUNIARTO
Direktur : Tuan ANDREAS ROY INDRRA SALIM
Direktur Independen : Tuan MEHMET TANJU ULA
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya menandatangani Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- IV. RUPS Tahunan berdasarkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat menyetujui:
1. Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang seluruhnya berjumlah net Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) dan menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan pengalokasian besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut;
2. Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan lain bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang seluruhnya berjumlah net Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah) dan menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan pengalokasian besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi dari jumlah total tersebut.
- V. RUPS Tahunan berdasarkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat menyetujui:
Menyetujui penunjukkan Kantor Akuntan Publik SIDDHARTA WIDJAJA & REKAN sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019, serta menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN
Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas dimana RUPST telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran deviden yang berasal dari akumulasi laba ditahan perseroan dari tahun - tahun buku sebelumnya sebesar Rp.500 (lima ratus Rupiah) per saham dimana sebesar Rp.200 (dua ratus Rupiah) per saham telah dibagikan sebagai deviden interim pada tanggal 29 November 2018, sehingga sisaanya sebesar Rp.300,- (tiga ratus Rupiah) per saham akan dibagikan berdasarkan jadwal dan tata cara pembagian deviden tunai tahun buku 2018 sebagai berikut:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	22 Mei 2019
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	23 Mei 2019
Cum Dividen di Pasar Tunai	24 Mei 2019
Ex Dividen di Pasar Tunai	27 Mei 2019
Recording Date yang berlaku atas Dividen	24 Mei 2019
Pembayaran Dividen	14 Juni 2019

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Mei 2019.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Juni 2019. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek Perseroan (BAE) PT EDI Indonesia Divisi Biro Administrasi Efek, Wisma SMR, 10th Floor, J. Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta 14350, telepon 650 5829 652 1010 Ext. 8230 paling lambat pada tanggal 10 Juni 2019 pada Pk. 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotong pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah diligulasasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 10 Juni 2019 (5 hari bursa sebelum tanggal pembayaran), tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 30%.
6. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat diambil di BAE mulai September 2019.
7. Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka.

Citeureup - Bogor, 16 Mei 2019
Direksi Perseroan